



YAYASAN WIJAYA KUSUMA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

NOMOR 192 TAHUN 2026

TENTANG

KURIKULUM PERGURUAN TINGGI (KPT)

BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan lulusan Program Studi Magister Ilmu Politik bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berkompeten dan berkualitas, dan berdampak maka diperlukan penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) berbasis Outcome Based Education (OBE);
- c. Bahwa penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Peraturan Rektor Nomor 184 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Implementasi Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian serta Peningkatan (PPEPP) Standar Mutu Pendidikan Tinggi UWKS;
8. Keputusan Rektor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan SKS Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
9. Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
10. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 142 Tahun 2026 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
11. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 170 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

Memperhatikan : Surat Dekan FISIP Nomor : 329/FISIP/UWKS/VII/2026 tanggal 28 Juli 2026 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Kurikulum Program Studi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TENTANG KURIKULUM PERGURUAN TINGGI (KPT) BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Pertama : Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) Berbasis Outcome Based Education (OBE) Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Politik sebagaimana diktum Pertama disusun dengan struktur sebagai berikut :

- I. Identitas Program Studi;
- II. Evaluasi Kurikulum Dan Tracer Study;
- III. Landasan Perancangan dan Pengembangan

- Kurikulum;
- IV. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi;
 - V. *Body Of Knowledge* Program Studi;
 - VI. Persyaratan Kelulusan;
 - VII. Standar Kompetensi Lulusan;
 - VIII. Matriks Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi;
 - IX. Penetapan Bahan Kajian, Pembentukan Mata Kuliah;
 - X. Struktur Mata Kuliah;
 - XI. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum;
 - XII. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi.

- Ketiga : Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dilengkapi dengan instrumen pembelajaran berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kontrak kuliah, bahan ajar, buku ajar, SOP, dan Pedoman Pelaksanaan secara teknis diatur dengan Keputusan Dekan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 19 Agustus 2026
Rektor,




Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, MSi.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Para Wakil Rektor;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Ketua Lembaga / Badan;
4. Kepala Biro Administrasi Akademik;
5. Kepala UPT TIK;
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Lampiran Keputusan Rektor
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Nomor : 192 Tahun 2026
Tanggal : 19 Agustus 2026

**KURIKULUM PERGURUAN TINGGI (KPT)
BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**KURIKULUM PERGURUAN TINGGI (KPT)
BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION***

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
TAHUN 2026**



PENGESAHAN				
	Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Diperiksa oleh	Disahkan Oleh
Jabatan	Ka. Prodi	Dekan Fakultas	Ketua BP3	Rektor
Tanda Tangan				
Nama	Dr. Darsono, Drs., M.Si.	Dr. Sugeng Pujileksono, M.Si	Prof. Dr. Ir. H. Ismanto Hadi Santoso, MS	Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si
Tanggal Terbit				
Revisi	00			

Copyright 2026: Dokumen ini adalah bersifat rahasia, Penggandaan dokumen ini harus seijin Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (BP3) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Kurikulum 2026 Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini dapat diselesaikan dengan baik. Kurikulum ini disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Strata-2 (S-2)/Magister yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, analitis, dan profesional dalam bidang ilmu politik, khususnya dalam merespons dinamika politik, pemerintahan, kebijakan publik, dan pembangunan di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Untuk merespons perkembangan dan tuntutan profesional di masyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh hasil Tracer Studi, Kurikulum 2026 Prodi MIP FISIP UWKS ini dipilah menjadi 2 konsentrasi, yaitu Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah dan Konsentrasi Politik Kebijakan Publik. Masing-masing konsentrasi menyediakan muatan yang spesifik sesuai keilmuannya dengan tetap berada pada satu naungan Prodi Magister Ilmu Politik.

Penyusunan kurikulum ini mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan ketentuan dari Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL) Indonesia serta pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang menekankan capaian pembelajaran lulusan secara terukur, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kurikulum ini juga dirancang agar selaras dengan perkembangan ilmu politik kontemporer yang semakin kompleks, multidisipliner, dan berbasis pada analisis empiris serta refleksi teoritis yang kritis.

Dokumen ini memuat visi, misi, dan tujuan program studi, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), serta struktur mata kuliah yang disusun secara integratif dan berjenjang. Setiap mata kuliah dirancang untuk mendukung penguatan kompetensi akademik mahasiswa, mulai dari penguasaan teori, kemampuan metodologis, hingga keterampilan penelitian yang bermuara pada penyusunan tesis sebagai karya ilmiah akhir atau publikasi artikel pada jurnal ilmiah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan kurikulum ini, baik dari unsur pimpinan Universitas dan Fakultas, dosen, tenaga kependidikan, maupun pihak-pihak lain yang telah memberikan masukan dan pemikiran konstruktif. Semoga kurikulum ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan serta menghasilkan lulusan yang unggul, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu politik dan masyarakat luas.

Akhirnya, kami menyadari bahwa dokumen ini masih terbuka terhadap penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Surabaya, Juni 2026
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER.....	0
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
I. IDENTITAS PROGRAM STUDI.....	3
II. EVALUASI KURIKULUM DAN <i>TRACER STUDY</i>.....	4
1..... Pendahuluan.....	4
2..... Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study.....	6
III. LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM.....	14
1..... Landasan Filosofis.....	8
2..... Landasan Sosiologi.....	10
3..... Landasan Yuridis.....	12
IV. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI.....	15
1. Visi Program Studi	15
2. Misi Program Studi.....	15
3. Tujuan Program Studi.....	15
V. <i>BODY OF KNOWLEDGE</i> PROGRAM STUDI.....	17
1. Gambaran <i>Body of Knowledge</i> (BoK) Program Studi.....	17
VI. PERSYARATAN KELULUSAN.....	21
1. Persyaratan Lulus Program Studi.....	21
VII. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	22
1. Profil Lulusan.....	22
2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).....	24
VIII. MATRIKS PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN	
LULUSAN PROGRAM STUDI.....	26
8.1. Hubungan CPL Program Studi dan Profil Lulusan Program Studi.....	26
IX. PENETAPAN BAHAN KAJIAN DAN PEMBENTUKAN	
MATA KULIAH.....	27
1. Prinsip Penetapan Bahan Kajian.....	27
2. Pengelompokan Bidang.....	27
3. BoK dan Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah.....	28
4. BoK dan Konsentrasi Politik Kebijakan Publik.....	29
X. STRUKTUR MATA KULIAH.....	31
1. Mata Kuliah Wajib Umum.....	31
2. Mata Kuliah Wajib Komponen Riset.....	31
3. Mata Kuliah Wajib Konsentrasi.....	31
4. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi.....	32
5. Sebaran Mata Kuliah Per Semester.....	33
XI. MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM.....	35
XII. SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM	
STUDI.....	39
XIII. PENUTUP.....	41

I. IDENTITAS PROGRAM STUDI

Nama PT	: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS)
Nama Fakultas	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Nama Prodi	: Ilmu Politik Program Magister/Magister Ilmu Politik (MIP)
Konsentrasi	: 1. Politik Lokal dan Otonomi Daerah 2. Politik Kebijakan Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata 2/Magister (S-2)
Berdiri	: SK Pendirian dan Izin Operasional Program Studi No.239/D/T/ 2009 Tertanggal 20 Februari 2009
Akreditasi Saat ini	: B
Dasar	: Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 1198/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IV/2024, Tertanggal 2 April 2024. Berlaku pada 17 April 2024 - 17 April 2029
Alamat Prodi	: Jln. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya

II. EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY

1. Pendahuluan

Perkembangan dinamika politik, tata kelola pemerintahan, demokrasi lokal, dan kebijakan publik pada era globalisasi dan transformasi digital menuntut tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas akademik, analitis, dan profesional dalam bidang ilmu politik. Kompleksitas persoalan politik kontemporer, penguatan demokrasi lokal, desentralisasi pemerintahan, perkembangan kebijakan publik, serta perubahan relasi negara dan masyarakat menuntut lulusan yang tidak hanya memahami teori politik, tetapi juga mampu melakukan analisis, penelitian, dan pengambilan keputusan berbasis bukti ilmiah dan etika akademik (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

Program Studi Magister Ilmu Politik diselenggarakan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan pengembangan ilmu pengetahuan melalui riset, kemampuan analisis politik dan kebijakan publik secara interdisipliner, serta kemampuan profesional dalam bidang politik lokal, tata kelola pemerintahan, demokrasi, dan kebijakan publik. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 8, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta pendekatan Outcome Based Education (OBE) yang menitikberatkan pada capaian pembelajaran lulusan (Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012; Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023; Spady, 1994).

Selain berorientasi pada pengembangan akademik, kurikulum Magister Ilmu Politik juga dirancang berdasarkan kebutuhan stakeholders, perkembangan dunia kerja, dan hasil tracer study alumni. Hasil tracer study menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa dan alumni Program Studi Magister Ilmu Politik telah bekerja pada berbagai sektor strategis, baik di lembaga pemerintahan, lembaga legislatif, partai politik, penyelenggara pemilu, media, lembaga swadaya masyarakat, maupun sektor publik lainnya. Sebagian alumni juga berkarier sebagai akademisi, peneliti, konsultan politik dan kebijakan, serta aktivis sosial-politik.

Temuan tracer study menunjukkan bahwa kompetensi yang diperoleh selama proses perkuliahan memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pekerjaan alumni, terutama dalam kemampuan analisis politik, penyusunan kebijakan, pengambilan

keputusan strategis, riset politik, tata kelola pemerintahan, serta kemampuan komunikasi akademik dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Mata kuliah yang dikembangkan dalam kurikulum Program Studi Magister Ilmu Politik dinilai telah mendukung kebutuhan profesional mahasiswa dan alumni dalam menjalankan tugas pada bidang pemerintahan, politik lokal, kebijakan publik, maupun organisasi sosial-politik.

Namun demikian, hasil tracer study dan masukan stakeholders juga menunjukkan perlunya pendalaman materi yang lebih terspesialisasi sesuai bidang kompetensi dan kebutuhan profesi lulusan. Selama ini, struktur pembelajaran masih cenderung diberikan dalam satu paket umum karena pelaksanaan konsentrasi pada Program Studi Magister Ilmu Politik belum berjalan secara penuh dan terstruktur. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan penguatan kompetensi spesifik dalam bidang politik lokal dan otonomi daerah maupun politik kebijakan publik belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal.

Oleh karena itu, pengembangan kurikulum baru diarahkan pada penguatan sistem konsentrasi yang lebih implementatif dan terstruktur melalui pengembangan dua konsentrasi utama, yaitu (1) Politik Lokal dan Otonomi Daerah (2) Politik Kebijakan Publik. Kedua konsentrasi tersebut dirancang untuk memperkuat kompetensi akademik dan profesional mahasiswa sesuai kebutuhan dunia kerja, perkembangan keilmuan, dan dinamika praktik politik serta pemerintahan di lapangan.

Pengembangan Kurikulum Magister Ilmu Politik juga memperhatikan perkembangan Body of Knowledge (BoK) ilmu politik yang menempatkan ilmu politik sebagai disiplin ilmu yang dinamis, multidisipliner, dan responsif terhadap perkembangan demokrasi, governance, kebijakan publik, politik lokal, dan isu-isu global kontemporer. Oleh karena itu, kurikulum dirancang tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada kemampuan riset, analisis kebijakan, problem solving, publikasi ilmiah, dan pengembangan keilmuan politik secara kontekstual dan aplikatif.

Dalam implementasinya, pengembangan kurikulum dilakukan secara berkelanjutan melalui mekanisme evaluasi, monitoring, dan penjaminan mutu internal perguruan tinggi agar tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan stakeholders, serta standar mutu pendidikan tinggi nasional. Sistem pengembangan dan evaluasi kurikulum mengacu pada kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI),

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan regulasi terkait tata kelola serta pengawasan internal pendidikan tinggi, termasuk Permendikdisaintek Nomor 52 Tahun 2025 dan regulasi terkait lainnya.

Dengan pengembangan kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE), penguatan konsentrasi keilmuan, dan pendekatan berbasis riset, Program Studi Magister Ilmu Politik diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, profesional, adaptif terhadap perubahan sosial-politik, serta mampu berkontribusi dalam penguatan demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan publik pada tingkat lokal, nasional, maupun global.

2. Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*

Hasil tracer study Program Studi Magister Ilmu Politik menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa dan alumni telah bekerja pada berbagai sektor strategis, baik di lembaga pemerintahan, lembaga legislatif, partai politik, penyelenggara pemilu, lembaga swadaya masyarakat, media, maupun sektor publik lainnya. Sebagian alumni juga berkarier sebagai akademisi, peneliti, konsultan politik dan kebijakan, serta aktivis sosial-politik di tingkat lokal maupun nasional.

Temuan tracer study menunjukkan bahwa kompetensi yang diperoleh selama proses perkuliahan memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pekerjaan alumni, terutama dalam kemampuan analisis politik, penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, riset politik, tata kelola pemerintahan, serta kemampuan komunikasi dan penyusunan rekomendasi strategis. Mata kuliah yang dikembangkan dalam kurikulum Magister Ilmu Politik dinilai telah mendukung kebutuhan profesional mahasiswa dan alumni dalam menjalankan tugas pada bidang pemerintahan, politik lokal, kebijakan publik, maupun organisasi sosial-politik.

Selain itu, hasil tracer study dan masukan stakeholders menunjukkan perlunya pendalaman materi yang lebih terspesialisasi sesuai bidang kompetensi dan kebutuhan profesi lulusan. Selama ini, struktur pembelajaran masih cenderung diberikan dalam satu paket umum karena pelaksanaan konsentrasi di Program Studi Magister Ilmu Politik belum berjalan secara penuh dan terstruktur. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan penguatan kompetensi spesifik dalam bidang politik lokal dan otonomi daerah maupun politik kebijakan publik belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal.

Oleh karena itu, pengembangan kurikulum baru diarahkan pada penguatan sistem konsentrasi yang lebih implementatif dan terstruktur melalui pemisahan jalur keilmuan Politik Lokal dan Otonomi Daerah serta Politik Kebijakan Publik. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pendalaman kompetensi akademik dan profesional yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan keilmuan, dan dinamika praktik politik serta pemerintahan di lapangan.

Masukan dari alumni dan pengguna lulusan juga menunjukkan perlunya penguatan kompetensi berbasis riset, kemampuan analisis kebijakan, publikasi ilmiah, penguasaan isu-isu politik kontemporer, serta kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan dinamika politik global. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum Magister Ilmu Politik dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan Outcome Based Education (OBE), agar lulusan mampu memenuhi tuntutan dunia kerja, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan keilmuan politik secara dinamis.

Tracer study juga menunjukkan bahwa fleksibilitas kurikulum melalui konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah serta Politik Kebijakan Publik akan memberikan ruang penguatan kompetensi yang lebih fokus sesuai kebutuhan profesi dan minat akademik mahasiswa. Dengan demikian, kurikulum Program Studi Magister Ilmu Politik diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kapasitas profesional dan kontribusi nyata dalam penguatan demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan publik.

III. LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

1. Landasan Filosofis

Perancangan dan pengembangan Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) berlandaskan pada filosofi pendidikan yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai instrumen untuk membangun manusia yang berintegritas, kritis, demokratis, berkeadilan, dan memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan publik. Kurikulum dikembangkan dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip demokrasi, keadilan sosial, kebebasan akademik, etika keilmuan, serta tanggung jawab sosial perguruan tinggi.

Filosofi kurikulum menempatkan ilmu politik bukan semata-mata sebagai pengetahuan mengenai kekuasaan, negara, dan institusi politik, tetapi sebagai ilmu yang berfungsi untuk memahami, menjelaskan, mengkritisi, dan memberikan alternatif terhadap berbagai persoalan kekuasaan dan kehidupan publik. Dengan demikian, pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mampu membaca politik secara kritis, reflektif, kontekstual, dan transformatif, serta menghubungkan teori dengan dinamika politik yang berkembang di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Pengembangan kurikulum juga didasarkan pada kesadaran bahwa lingkungan politik kontemporer mengalami perubahan yang sangat cepat. Demokrasi tidak lagi berlangsung hanya melalui institusi formal, tetapi juga melalui ruang digital, media sosial, jaringan masyarakat sipil, gerakan warga, dan berbagai bentuk partisipasi politik baru. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan menghadirkan peluang sekaligus tantangan berupa disinformasi, manipulasi opini publik, polarisasi, politik berbasis algoritma, serta perubahan pola relasi antara negara dan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum Magister Ilmu Politik perlu membekali mahasiswa dengan kemampuan membaca perubahan tersebut secara ilmiah sekaligus memiliki kecakapan digital dan etika dalam memanfaatkan teknologi untuk kepentingan akademik dan publik.

Dalam perspektif filosofis, kurikulum dikembangkan dengan memadukan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dimensi ontologis menempatkan kekuasaan, negara, masyarakat, demokrasi, kebijakan publik, dan perubahan politik sebagai realitas

yang terus berkembang dan perlu dikaji secara kritis. Dimensi epistemologis menegaskan pentingnya penguasaan teori, metodologi penelitian, pemikiran politik, analisis data, serta kemampuan menghasilkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sementara itu, dimensi aksiologis menempatkan ilmu politik sebagai pengetahuan yang harus memberikan manfaat bagi penguatan demokrasi, keadilan sosial, tata kelola pemerintahan, penyelesaian persoalan publik, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Kurikulum juga berorientasi pada pengembangan human-centered political science, yaitu pengembangan ilmu politik yang menempatkan manusia dan kepentingan publik sebagai pusat perhatian. Kekuasaan tidak hanya dipahami dari perspektif struktur dan institusi, tetapi juga dari pengalaman masyarakat, relasi sosial, praktik budaya, identitas, kepentingan kelompok, serta dinamika di tingkat lokal. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa memahami politik secara lebih utuh dengan mempertemukan perspektif makro, meso, dan mikro dalam menganalisis berbagai fenomena politik.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan kurikulum diarahkan untuk memperkuat kemampuan mahasiswa dalam memahami karakter politik Indonesia yang plural, dinamis, dan terus mengalami perubahan. Politik lokal, desentralisasi, demokrasi elektoral, pemerintahan daerah, kebijakan publik, masyarakat sipil, ekonomi politik, politik identitas, serta relasi negara dan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengembangan keilmuan. Perspektif lokal tidak diposisikan sebagai wilayah kajian yang terpisah dari dinamika nasional dan global, tetapi sebagai ruang penting untuk memahami bagaimana kekuasaan, kebijakan, dan demokrasi bekerja secara konkret dalam kehidupan masyarakat.

Kurikulum dirancang dengan prinsip interdisipliner, adaptif, berbasis masalah, berbasis riset, dan berorientasi pada pemecahan persoalan publik. Ilmu politik dipertautkan dengan bidang ilmu lain seperti administrasi publik, sosiologi, hukum, ekonomi, komunikasi, teknologi informasi, studi pembangunan, dan kajian kebijakan. Pendekatan tersebut diperlukan agar lulusan mampu memahami persoalan politik yang semakin kompleks dan tidak dapat dijelaskan melalui satu perspektif keilmuan saja.

Pada akhirnya, filosofi pengembangan Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP UWKS diarahkan untuk membentuk political scholar and public problem solver: lulusan yang tidak hanya menguasai teori dan metodologi ilmu politik, tetapi

mampu menghasilkan pengetahuan, membaca perubahan, melakukan penelitian yang bermutu, merumuskan rekomendasi kebijakan, serta berkontribusi dalam penyelesaian persoalan publik. Lulusan diharapkan memiliki integritas akademik, kemampuan berpikir kritis dan analitis, kecakapan metodologis dan digital, sensitivitas terhadap persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial, serta komitmen untuk memperkuat demokrasi dan tata kelola publik yang berkeadaban.

Dengan filosofi tersebut, Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP UWKS tidak hanya diposisikan sebagai perangkat pembelajaran, tetapi sebagai instrumen pengembangan keilmuan dan transformasi sosial yang mampu menjawab tuntutan zaman, tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan, dan berorientasi pada masa depan ilmu politik serta kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Landasan Sosiologis

Perancangan dan pengembangan Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) didasarkan pada dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perubahan. Perubahan struktur sosial, perkembangan teknologi digital, transformasi ekonomi, dinamika politik lokal dan nasional, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta berkembangnya berbagai bentuk relasi sosial dan politik menuntut pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang mampu memahami sekaligus merespons persoalan masyarakat secara kritis, ilmiah, dan konstruktif.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural dan heterogen dengan keragaman suku, agama, budaya, kelas sosial, kepentingan, dan identitas. Keragaman tersebut merupakan kekuatan sosial, tetapi pada saat yang sama dapat melahirkan berbagai persoalan seperti ketimpangan, eksklusi sosial, konflik kepentingan, politik identitas, intoleransi, polarisasi, serta kesenjangan akses terhadap sumber daya dan proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut membutuhkan lulusan Magister Ilmu Politik yang memiliki kemampuan memahami kompleksitas masyarakat secara kontekstual serta mampu menganalisis berbagai persoalan politik berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan sosial, inklusivitas, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Perubahan pola hubungan antara negara dan masyarakat juga menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan kurikulum. Masyarakat semakin aktif

dalam menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan terhadap pemerintah, membangun gerakan sosial, serta terlibat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan publik. Pada saat yang sama, muncul aktor-aktor nonnegara seperti organisasi masyarakat sipil, komunitas, kelompok kepentingan, media, lembaga riset, sektor swasta, dan berbagai jaringan masyarakat yang memiliki pengaruh semakin besar terhadap proses politik. Kondisi ini menuntut penguasaan perspektif yang lebih luas mengenai kekuasaan, governance, partisipasi politik, masyarakat sipil, kebijakan publik, dan relasi negara–masyarakat.

Transformasi digital turut mengubah kehidupan sosial dan politik masyarakat. Media sosial dan platform digital telah menjadi ruang baru bagi komunikasi politik, pembentukan opini publik, mobilisasi sosial, partisipasi politik, dan kontestasi kekuasaan. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan persoalan berupa disinformasi, misinformasi, ujaran kebencian, polarisasi digital, manipulasi informasi, serta rendahnya literasi politik dan digital sebagian masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum Magister Ilmu Politik perlu membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami perubahan sosial-politik berbasis teknologi sekaligus memiliki literasi digital, kemampuan analisis data, dan etika dalam memanfaatkan teknologi untuk kepentingan akademik dan publik.

Perubahan sosial juga berlangsung dalam konteks ekonomi dan dunia kerja. Kompleksitas persoalan pembangunan, ketimpangan sosial-ekonomi, kemiskinan, perubahan struktur pekerjaan, urbanisasi, migrasi, ekonomi digital, serta tuntutan terhadap pemerintahan yang transparan dan responsif membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan analisis kebijakan dan pemecahan masalah publik. Lulusan Magister Ilmu Politik tidak hanya dituntut memiliki kompetensi akademik, tetapi juga mampu menerjemahkan pengetahuan politik ke dalam analisis, rekomendasi, dan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan organisasi publik maupun nonpublik.

Dalam konteks lokal dan regional, keberadaan Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP UWKS di Surabaya dan Jawa Timur memiliki posisi strategis. Jawa Timur merupakan wilayah dengan karakter sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang kompleks, sehingga menjadi ruang penting untuk pengembangan kajian mengenai demokrasi lokal, pemerintahan daerah, politik elektoral, kebijakan publik, pembangunan,

ekonomi politik, masyarakat sipil, politik desa, serta relasi antara aktor negara dan nonnegara. Kedekatan program studi dengan realitas sosial tersebut menjadi modal penting untuk mengembangkan pembelajaran dan penelitian yang berbasis pada persoalan nyata di masyarakat.

Landasan sosiologis juga menegaskan pentingnya keterhubungan antara perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk memperkuat pembelajaran berbasis pengalaman dan persoalan nyata melalui penelitian, studi kasus, proyek kebijakan, pengabdian kepada masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai institusi. Dengan demikian, proses pendidikan tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi berkembang menjadi proses produksi pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP UWKS dikembangkan secara responsif, kontekstual, adaptif, inklusif, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan publik. Kurikulum diharapkan mampu menjembatani kebutuhan perkembangan ilmu politik dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, media, dan sektor lainnya.

Dengan landasan sosiologis tersebut, Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP UWKS diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu membaca perubahan sosial-politik, memahami keragaman masyarakat, menganalisis relasi kekuasaan, merumuskan alternatif kebijakan, serta berkontribusi dalam membangun kehidupan demokrasi dan tata kelola publik yang inklusif, responsif, dan berkeadilan. Kurikulum dengan demikian menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa pendidikan Magister Ilmu Politik tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat hari ini sekaligus mampu mengantisipasi perubahan sosial-politik di masa depan.

3. Landasan Yuridis

Pengembangan Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Politik mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendidikan tinggi berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16).
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5007).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 5500).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6762).
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961).

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 523).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51)
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2021 tentang integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363).
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666).
14. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661).
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Untuk Status terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul.
16. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
17. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
18. Peraturan Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 02 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2024.

19. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Unit Kerja di Lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
20. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 142 Tahun 2026 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

IV. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI

1. Visi Program Studi

Menjadi Program Studi Magister Ilmu Politik yang unggul dalam pengembangan ilmu politik lokal dan tata kelola kebijakan publik berbasis riset dan budaya nasional serta bereputasi nasional dan internasional.

2. Misi Program Studi

- a. Menyelenggarakan pendidikan Magister Ilmu Politik yang unggul, inovatif, dan berbasis riset dalam bidang politik lokal dan tata kelola kebijakan publik untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan penelitian yang berkualitas dan berkelanjutan dalam bidang politik lokal, otonomi daerah, dan tata kelola kebijakan publik guna memperkaya pengembangan ilmu politik serta memberikan solusi atas berbagai persoalan publik.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan advokasi kebijakan berbasis riset untuk mendukung penguatan demokrasi lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan
- d. Mengembangkan budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Kewijayakusumaan, budaya nasional, etika akademik, dan tanggung jawab sosial dalam pengembangan ilmu politik.
- e. Mengembangkan jejaring kerja sama dan kemitraan strategis dengan pemerintah, lembaga politik, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

3. Tujuan Program Studi

- a. Menghasilkan lulusan Magister Ilmu Politik yang unggul, berintegritas, dan kompeten dalam bidang politik lokal dan tata kelola kebijakan publik.

- b. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran berbasis riset yang adaptif terhadap perkembangan ilmu politik, pemerintahan, dan kebijakan publik.
- c. Mengembangkan penelitian, publikasi ilmiah, dan inovasi kebijakan yang berkontribusi pada pengembangan ilmu politik serta penyelesaian berbagai persoalan publik.
- d. Mengembangkan peran program studi dalam penguatan demokrasi lokal, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan advokasi kebijakan.
- e. Mengembangkan budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Kewijayakusumaan, budaya nasional, etika akademik, dan tanggung jawab sosial.
- f. Mengembangkan jejaring kerja sama dan kemitraan strategis di tingkat nasional dan internasional untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

V. BODY OF KNOWLEDGE PROGRAM STUDI

1. Gambaran Body of Knowledge (BoK) Program Studi

Body of Knowledge (BoK) Program Studi Magister Ilmu Politik merupakan landasan akademik dalam pengembangan kurikulum yang menggambarkan ruang lingkup, struktur, dan kedalaman kajian ilmu politik pada level magister. Merujuk pada Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL) Indonesia, BoK disusun berdasarkan perkembangan ilmu politik kontemporer, kebutuhan dunia kerja, perkembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan, serta pendekatan Outcome Based Education (OBE).

BoK Program Studi Magister Ilmu Politik menempatkan ilmu politik sebagai disiplin ilmu yang dinamis, kritis, multidisipliner, dan kontekstual dalam memahami relasi kekuasaan, negara, demokrasi, pemerintahan, kebijakan publik, dan dinamika masyarakat. Pada jenjang magister, pengembangan keilmuan diarahkan tidak hanya pada penguasaan teori, tetapi juga pada kemampuan analitis, riset, problem solving, dan pengembangan pengetahuan yang inovatif dan aplikatif.

Secara substantif, *Body of Knowledge* Program Studi Magister Ilmu Politik dikembangkan ke dalam beberapa domain/ranah utama sebagai berikut:

a. Filsafat, Epistemologi, dan Metode Ilmu Politik

Domain ini membahas dasar-dasar keilmuan ilmu politik yang meliputi cakupan disiplin ilmu politik, perkembangan paradigma dan mazhab ilmu politik, pendekatan dalam ilmu politik, serta metode dan cara kerja ilmu politik dalam memahami fenomena politik.

Kajian dalam domain ini mencakupi; (1). skop dan perkembangan ilmu politik; (2) epistemologi dan metodologi ilmu politik; (3) pendekatan tradisional, behaviorisme, post-behaviorisme, institusionalisme, dan pendekatan kontemporer; (4) hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya; (5) perkembangan studi politik kontemporer. Ranah ini menjadi dasar pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan metodologis mahasiswa dalam memahami fenomena politik secara ilmiah.

b. Teori Politik, Negara, Demokrasi, dan Kekuasaan

Ranah ini membahas perkembangan pemikiran politik klasik, modern, dan kontemporer, serta berbagai konsep mengenai negara, demokrasi, kekuasaan, legitimasi, ideologi, dan etika politik. Kajian dalam domain ini mencakup: (1) teori politik klasik, modern, dan kontemporer; (2) teori negara dan demokrasi; (3) relasi kekuasaan dan governance; (4) ideologi politik; (5) etika politik dan etika publik; (6) demokrasi dan dinamika politik kontemporer. Domain ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan konseptual mahasiswa dalam menganalisis dinamika politik dan tata kelola pemerintahan secara kritis dan reflektif.

c. Politik Lokal, Otonomi Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan

Domain ini menjadi salah satu kekhasan Program Studi Magister Ilmu Politik yang menitikberatkan pada kajian politik lokal dan pemerintahan daerah dalam konteks desentralisasi dan demokrasi lokal di Indonesia. Kajian dalam domain ini mencakup: (1) politik lokal dan desentralisasi; (2) otonomi daerah; (3) pemerintahan daerah dan hubungan pusat–daerah; (4) partai politik dan pemilu daerah; (5) politik anggaran dan pembangunan daerah; (6) legislasi daerah dan politik DPRD; (7) konflik sosial dan manajemen konflik lokal. Ranah ini diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu memahami, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap persoalan politik lokal dan tata kelola pemerintahan daerah.

d. Kebijakan Publik dan Governance

Domain ini membahas proses formulasi, implementasi, evaluasi, dan analisis kebijakan publik dalam konteks tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Kajian dalam domain ini mencakup: (1) teori dan analisis kebijakan publik; (2) formulasi dan implementasi kebijakan; (3) evaluasi kebijakan publik; (4) reformasi birokrasi; (5) governance dan pelayanan publik; (6) kebijakan fiskal dan politik anggaran; (7) policy brief dan riset kebijakan terapan. Ranah ini dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis kebijakan, penyusunan rekomendasi strategis, dan pengambilan keputusan berbasis bukti ilmiah.

e. Politik Global dan Isu Politik Kontemporer

Domain ini membahas perkembangan politik global dan berbagai isu politik kontemporer yang memengaruhi dinamika politik nasional dan lokal. Kajian dalam domain ini mencakup: (1) globalisasi dan politik global; (2) demokrasi digital; (3) politik identitas; (4) politik media dan teknologi informasi; (5) geopolitik; (6) politik lingkungan; (6) isu-isu politik kontemporer lainnya. Ranah ini dimaksudkan untuk memperluas perspektif mahasiswa dalam memahami dinamika politik global dan pengaruhnya terhadap politik nasional dan lokal.

f. Metodologi Penelitian dan Produksi Pengetahuan

Domain ini membahas pengembangan kemampuan penelitian dan produksi karya ilmiah dalam bidang ilmu politik dan kebijakan publik. Kajian dalam domain ini mencakup: (1) metodologi penelitian ilmu politik; (2) metodologi penelitian politik kebijakan publik; (3) metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan *mixed methods*; (4) teknik analisis data politik; (5) penulisan akademik dan publikasi ilmiah; (6) tesis. Domain ini diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian yang inovatif, teruji secara metodologis, serta menghasilkan karya ilmiah yang berkontribusi pada pengembangan ilmu politik dan kebijakan publik.

Body of Knowledge Program Studi Magister Ilmu Politik menjadi dasar dalam penyusunan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bahan kajian, struktur mata kuliah, serta pengembangan proses pembelajaran yang berbasis Outcome Based Education (OBE).

Tabel 1: *Body of Knowledge (BoK)* Program Studi Magister Ilmu Politik

No.	Domain Body of Knowledge	Deskripsi Domain
1	Filsafat, Epistemologi, dan Metode Ilmu Politik	Domain ini membahas dasar-dasar keilmuan ilmu politik yang meliputi skop disiplin ilmu politik, perkembangan paradigma dan mazhab ilmu politik, pendekatan dalam ilmu politik, serta metode dan cara kerja ilmu politik dalam memahami fenomena politik. Domain ini menjadi landasan pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan metodologis dalam memahami fenomena politik secara ilmiah.
2	Teori Politik, Negara, Demokrasi, Kekuasaan, dan Etika Politik	Domain ini membahas perkembangan pemikiran politik klasik, modern, dan kontemporer, serta konsep negara, demokrasi, kekuasaan, legitimasi, ideologi, etika politik, etika publik, dan akuntabilitas. Domain

		ini memperkuat kemampuan konseptual mahasiswa dalam menganalisis dinamika politik dan tata kelola pemerintahan secara kritis dan reflektif.
3	Politik Lokal, Desentralisasi, Pemerintahan Daerah, dan Tata Kelola Lokal	Domain ini merupakan kekhasan Program Studi Magister Ilmu Politik yang berfokus pada kajian politik lokal dan pemerintahan daerah dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Kajian mencakup hubungan pusat–daerah, partai politik dan pemilu daerah, legislasi daerah, pembangunan daerah, konflik sosial, serta tata kelola pemerintahan daerah. Domain ini diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu memahami dan memecahkan persoalan politik dan pemerintahan daerah secara komprehensif.
4	Kebijakan Publik, Governance, dan Reformasi Birokrasi	Domain ini membahas teori, analisis, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik dalam konteks tata kelola pemerintahan. Kajian mencakup reformasi birokrasi, governance, pelayanan publik, kebijakan fiskal, politik anggaran, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Domain ini memperkuat kemampuan analisis dan pengambilan keputusan strategis dalam sektor publik.
5	Politik Global dan Isu Politik Kontemporer	Domain ini membahas perkembangan politik global dan berbagai isu politik kontemporer yang memengaruhi dinamika politik nasional maupun lokal, seperti globalisasi, geopolitik, politik identitas, demokrasi digital, politik media, politik lingkungan, serta transformasi teknologi dan tata kelola global. Domain ini bertujuan memperluas perspektif mahasiswa dalam memahami perubahan politik pada tingkat nasional dan internasional.
6	Metodologi Penelitian dan Produksi Pengetahuan	Domain ini membahas pengembangan kemampuan penelitian dan produksi karya ilmiah dalam bidang ilmu politik dan kebijakan publik. Kajian mencakup metodologi penelitian ilmu politik dan kebijakan publik, metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods, teknik analisis data, penulisan akademik dan publikasi ilmiah, serta penyusunan tesis. Domain ini diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian yang inovatif, teruji secara metodologis, dan berkontribusi pada pengembangan ilmu politik dan kebijakan publik.

VI. PERSYARATAN KELULUSAN

1. Persyaratan Kelulusan

Lulusan Program Studi Magister Ilmu Politik diharapkan memiliki kompetensi akademik dan profesional dalam bidang politik lokal dan otonomi daerah serta politik kebijakan publik berbasis riset dan analisis ilmiah.

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik dinyatakan lulus dan berhak memperoleh gelar Magister Ilmu Politik (M.I.Pol.) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Menyelesaikan seluruh beban studi minimal 45 SKS sesuai kurikulum yang berlaku.
2. Lulus seluruh mata kuliah wajib, mata kuliah konsentrasi, dan mata kuliah pilihan sesuai ketentuan, serta lulus tesis atau publikasi artikel ilmiah hasil riset pada jurnal bereputasi, baik yang terideks Sinta-1 atau Sinta-2 maupun Scopus/WoS/Thompson minimum Q-4.
3. Memperoleh IPK minimum 3,00 (tiga koma nol nol) dan tidak ada nilai C.
4. Memiliki publikasi ilmiah atau luaran akademik bagi mahasiswa yang memilih riset dan menyusun tesis.
5. Memenuhi seluruh ketentuan administrasi akademik dan keuangan universitas.
6. Menjunjung tinggi etika akademik dan bebas dari plagiarisme.

VII. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Profil Lulusan

Tabel 8.1: Konsentrasi, Profil Lulusan, dan Kompetensi dan Peran Lulusan

No	Konsentrasi	Profil Lulusan	Kompetensi dan Peran/CPL
1	Politik Lokal dan Otonomi Daerah	PL-1.1 Ilmuwan dan Peneliti Politik	1.1 Mampu mengembangkan pengetahuan dalam bidang politik lokal dan otonomi daerah melalui riset yang inovatif dan teruji, menggunakan pendekatan interdisipliner, serta menghasilkan karya ilmiah yang berkontribusi pada pengembangan ilmu politik dan memperoleh pengakuan nasional maupun internasional.
		PL-1.2 Pelaksana/Birokrat pada Lembaga Negara	1.2 Mampu memecahkan permasalahan tata kelola pemerintahan daerah melalui penerapan teori dan analisis politik berbasis bukti, serta mengambil keputusan strategis secara profesional dan akuntabel dalam sistem pemerintahan.
		PL-1.3 Aktivis Sosial dan Politik	1.3 Mampu mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis analisis politik dan kebijakan publik secara kritis, inovatif, dan bertanggung jawab
		PL-1.4 Konsultan Politik dan Kebijakan	1.4 Mampu berperan sebagai konsultan bidang politik dan kebijakan publik pada tingkat lokal secara komprehensif, serta memberikan rekomendasi strategis berbasis riset dalam proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
2	Politik Kebijakan Publik	PL-2.1 Pelaksana/Birokrat pada Lembaga Pemerintahan di Pusat maupun Daerah	2.1 Mampu menerapkan dan mengembangkan analisis kebijakan publik dalam praktik pemerintahan pusat maupun daerah secara profesional, inovatif, dan berbasis bukti ilmiah.
		PL-2.2 Pelaksana/Birokrat pada Badan Usaha (Milik Negara/Daerah) dan sektor publik lainnya	2.2 Mampu mengelola dan mengevaluasi kebijakan serta tata kelola organisasi sektor publik dan BUMN/BUMD dengan pendekatan analisis politik dan kebijakan yang strategis dan akuntabel.
		PL-2.3 Analisis Profesional	2.3 Mampu melakukan analisis kebijakan dan dinamika pemerintahan secara komprehensif dengan pendekatan interdisipliner serta menyusun

		Pemerintahan dan Kebijakan	rekomendasi berbasis riset untuk lembaga pemerintah, media, maupun organisasi masyarakat.
		PL-2.4 Ilmuwan dan Peneliti Politik dan Kebijakan Publik	2.4 Mampu mengembangkan dan memperbarui pengetahuan dalam bidang politik dan kebijakan publik melalui penelitian yang inovatif dan teruji secara metodologis berbasis teori politik dan pendekatan interdisipliner, dengan menjunjung tinggi etika akademik dan tanggung jawab ilmiah, serta menghasilkan karya ilmiah yang kontributif bagi pengembangan keilmuan dan praktik kebijakan publik pada tingkat nasional maupun internasional.

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

A. CPL Sikap dan Tata Nilai (S)

CPL 1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan kebangsaan, budaya nasional, budaya kewijayakusumaan dalam menjalankan tugas akademik dan profesional.

CPL 2 Menjunjung tinggi integritas ilmiah, etika akademik, dan tanggung jawab profesional dalam penelitian dan praktik politik.

CPL 3 Menginternalisasi nilai demokrasi, keadilan, hak asasi manusia, dan kebhinekaan dalam analisis dan praktik politik dan kebijakan publik.

CPL 4 Bertanggung jawab atas pengembangan ilmu dan dampak sosial dari rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

B. CPL Pengetahuan (P)

CPL 5 Menguasai teori-teori lanjutan dalam ilmu politik, termasuk teori negara, demokrasi, kekuasaan, dan tata kelola.

CPL 6 Menguasai konsep dan dinamika politik lokal, otonomi daerah, serta relasi pusat daerah.

CPL 7 Menguasai teori dan pendekatan kebijakan publik sebagai proses politik yang melibatkan aktor, institusi, dan kepentingan.

CPL 8 Menguasai metodologi penelitian ilmu politik dan kebijakan publik secara komprehensif (kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods).

CPL 9 Memahami isu-isu politik nasional dan global secara kritis dan kontekstual.

C. CPL Keterampilan Umum (KU)

CPL 10 Mampu mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmu politik melalui riset yang inovatif dan teruji.

CPL 11 Mampu memecahkan permasalahan politik dan kebijakan publik melalui pendekatan inter atau multidisipliner.

CPL 12 Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan.

CPL 13 Mampu menyusun karya ilmiah yang layak publikasi nasional dan/atau internasional.

CPL 14 Mampu mengomunikasikan hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan secara efektif kepada pemangku kepentingan.

D. CPL Keterampilan Khusus (KK)

CPL 15 Mampu merancang dan melaksanakan penelitian politik lokal dan kebijakan publik secara mandiri untuk menghasilkan temuan yang kontributif.

CPL 16 Mampu menganalisis dinamika politik lokal dan otonomi daerah serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

CPL 17 Mampu melakukan analisis kebijakan publik secara komprehensif mulai dari formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.

CPL 18 Mampu menyusun policy brief, naskah akademik, dan rekomendasi strategis bagi lembaga pemerintah, organisasi politik, maupun sektor publik.

CPL 19 Mampu mengambil keputusan strategis berbasis analisis politik dan kebijakan dengan mempertimbangkan aspek etika dan dampak sosial.

VIII. MATRIKS PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI

1. Hubungan CPL Program Studi dan Profil Lulusan Program Studi

Tabel 8.1. Matrik hubungan CPL Program Studi dan Profil Lulusan Program Studi

CPL	PL-1.1 Ilmuwan & Peneliti Politik	PL-1.2 Birokrat Lembaga Negara	PL-1.3 Aktivis Sosial & Politik	PL-1.4 Konsultan Politik & Kebijakan	PL-2.1 Birokrat Pemerintahan	PL-2.2 BUMN/BUMD & Sektor Publik	PL-2.3 Analis Pemerintahan & Kebijakan	PL-2.4 Ilmuwan & Peneliti Politik/Kebijakan
CPL 1	✓	✓	✓		✓	✓		
CPL 2	✓		✓	✓			✓	✓
CPL 3	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
CPL 4	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
CPL 5	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CPL 6	✓	✓	✓	✓			✓	✓
CPL 7		✓		✓	✓	✓	✓	✓
CPL 8	✓			✓			✓	✓
CPL 9	✓		✓	✓			✓	✓
CPL 10	✓						✓	✓
CPL 11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPL 12	✓			✓			✓	✓
CPL 13	✓			✓			✓	✓
CPL 14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPL 15	✓			✓				✓
CPL 16	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
CPL 17		✓		✓	✓	✓	✓	✓
CPL 18		✓		✓	✓	✓	✓	✓
CPL 19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**BAB IX. PENETAPAN BAHAN KAJIAN DAN PEMBENTUKAN
MATA KULIAH**

1. Prinsip Penetapan Bahan Kajian

Bahan kajian Program Studi Magister Ilmu Politik ditetapkan berdasarkan:

- A. Profil lulusan pada dua konsentrasi:
 - 1. Politik Lokal dan Otonomi Daerah;
 - 2. Politik Kebijakan Publik.
- B. 19 CPL Program Studi yang mencakup sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
- C. Perkembangan keilmuan ilmu politik kontemporer.
- D. Kebutuhan masyarakat, pemerintahan, sektor publik, masyarakat sipil, dan dunia profesional.
- E. Perkembangan demokrasi, digitalisasi, kecerdasan buatan, governance, kebijakan berbasis bukti, dan perubahan politik lokal.
- F. Karakteristik Magister sebagai pendidikan akademik yang berorientasi pada penguasaan keilmuan, riset, analisis, dan pemecahan masalah.

2. Pengelompokan Bidang

Tabel 8: BoK dan Mata Kuliah Wajib Umum dan Komponen Riset

Body of Knowledge	Bahan Kajian	Mata Kuliah	SKS
Filsafat, Epistemologi, dan Metode Ilmu Politik	Cakupan dan perkembangan ilmu politik, epistemologi, paradigma dan metodologi ilmu politik	Skop dan Metodologi Ilmu Politik	3
Teori Politik, Negara, Demokrasi, dan Kekuasaan	Teori politik klasik, modern, dan kontemporer	Teori Politik	3
Teori Politik, Negara, Demokrasi, dan Kekuasaan	Negara, demokrasi, kekuasaan, dan governance	Teori Negara, Demokrasi, dan Kekuasaan	3
Kebijakan Publik dan Governance	Teori dan proses kebijakan publik	Teori Kebijakan Publik	3
Teori Politik, Negara, Demokrasi, dan Kekuasaan	Etika politik, birokrasi, dan akuntabilitas publik	Etika Politik, Birokrasi, dan Akuntabilitas	3

		Publik	
Politik Global dan Isu Politik Kontemporer	Politik global, globalisasi, geopolitik, dan isu kontemporer	Politik Global dan Isu Kontemporer	3
Metodologi Penelitian dan Produksi Pengetahuan	Metodologi penelitian ilmu politik	Metode Penelitian Ilmu Politik	3
Metodologi Penelitian dan Produksi Pengetahuan	Metodologi penelitian kebijakan publik	Metode Penelitian Kebijakan Publik	3
Metodologi Penelitian dan Produksi Pengetahuan	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	Tesis/Publikasi Artikel Ilmiah	6
Total			30 SKS

3. BoK dan Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah

Tabel 9: BoK dan MK Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah

Wajib

Body of Knowledge	Bahan Kajian	Mata Kuliah	SKS
Politik Lokal, Otonomi Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan	Politik lokal dan desentralisasi	Politik Lokal dan Desentralisasi	3
Politik Lokal, Otonomi Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintahan daerah dan hubungan pusat–daerah	Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat–Daerah	3
Politik Lokal, Otonomi Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan	Partai politik dan pemilu daerah	Partai Politik dan Pemilu Daerah	3
Total			9 SKS

Pilihan

Body of Knowledge	Bahan Kajian	Mata Kuliah	SKS
Politik Lokal, Otonomi Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan	Legislasi daerah dan politik DPRD	Legislasi Daerah dan Politik DPRD	3
Politik Lokal, Otonomi Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan	Pembangunan daerah	Isu dan Kebijakan Pembangunan Daerah	3
Politik Lokal, Otonomi Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan	Politik keuangan daerah	Politik Keuangan Daerah	3
Teori Politik, Negara, Demokrasi, dan Kekuasaan	Budaya dan pemikiran politik Indonesia	Budaya dan Pemikiran Politik Indonesia	3
Teori Politik, Negara, Demokrasi, dan Kekuasaan	Konstitusi dan kelembagaan negara	Konstitusi dan Kelembagaan Negara	3

Metodologi Penelitian dan Produksi Pengetahuan	Penulisan akademik dan publikasi ilmiah	Penulisan Akademik dan Publikasi Ilmiah	3
Politik Global dan Isu Politik Kontemporer	Politik identitas dan nasionalisme	Politik Identitas dan Nasionalisme	3
Kebijakan Publik dan Governance	Politik, hukum, dan kebijakan	Politik, Hukum, dan Kebijakan	3
Total			24 SKS

4. BoK dan Konsentrasi Politik Kebijakan Publik

Tabel 10: BoK dan Konsentrasi Politik Kebijakan Publik

Wajib

Body of Knowledge	Bahan Kajian	Mata Kuliah	SKS
Kebijakan Publik dan Governance	Analisis kebijakan publik	Analisis Kebijakan Publik Lanjutan	3
Kebijakan Publik dan Governance	Formulasi kebijakan publik	Formulasi Kebijakan Publik	3
Kebijakan Publik dan Governance	Politik birokrasi dan reformasi administrasi	Politik Birokrasi dan Reformasi Administrasi	3
Total			9 SKS

Pilihan

Body of Knowledge	Bahan Kajian	Mata Kuliah	SKS
Kebijakan Publik dan Governance	Implementasi dan evaluasi kebijakan publik	Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik	3
Kebijakan Publik dan Governance	Kebijakan fiskal dan politik anggaran	Kebijakan Fiskal dan Politik Anggaran	3
Kebijakan Publik dan Governance	Policy brief dan riset kebijakan terapan	Policy Brief dan Riset Kebijakan Terapan	3
Kebijakan Publik dan Governance	Manajemen pelayanan publik	Manajemen Pelayanan Publik	3
Kebijakan Publik dan Governance	Politik birokrasi dan reformasi administrasi	Politik Birokrasi dan Reformasi Administrasi	3
Metodologi Penelitian dan Produksi Pengetahuan	Penulisan akademik dan publikasi ilmiah	Penulisan Akademik dan Publikasi Ilmiah	3
Kebijakan Publik dan Governance	Ekonomi politik pembangunan	Ekonomi Politik Pembangunan	3
Total Ditawarkan			21 SKS

X. STRUKTUR MATA KULIAH

1. Mata Kuliah Wajib Umum

Tabel 11: Mata Kuliah Wajib Umum

No	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	Skop dan Metodologi Ilmu Politik	3	Pondasi epistemologi
2	Teori Politik	3	Pondasi teoritik
3	Teori Negara, Demokrasi, dan Kekuasaan	3	State & governance
4	Teori Kebijakan Publik	3	Dasar analisis kebijakan
5	Etika Politik, Birokrasi, dan Akuntabilitas Publik	3	Integritas dan etika politik-birokrasi
6	Politik Global dan Isu Kontemporer	3	Politik internasional
Total MKWU: 18 SKS, wajib bagi seluruh mahasiswa			

2. Mata Kuliah Wajib Komponen Riset

Tabel 12: Mata Kuliah Wajib Komponen Riset

No	Mata Kuliah	SKS
1	Metode Penelitian Ilmu Politik	3
2	Metode Penelitian Kebijakan Publik	3
3	Tesis/Publikasi Artikel Ilmiah	6
Total MKWKR: 15 SKS, wajib bagi seluruh mahasiswa		

3. Mata Kuliah Wajib Konsentrasi

Tabel 13: MK Wajib Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Smt 2)

No	Mata Kuliah	SKS
1	Politik Lokal dan Desentralisasi	3
2	Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat–Daerah	3
3	Partai Politik dan Pemilu Daerah	3
Total MKWK: 9 sks		

Tabel 14: MK Wajib Konsentrasi Politik Kebijakan Publik (Smt 2)

No	Mata Kuliah	SKS
1	Analisis Kebijakan Publik Lanjutan	3
2	Formulasi Kebijakan Publik	3
3	Politik Birokrasi & Reformasi Administrasi	3
Total MKWK: 9 sks		

4. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi

Tabel 15: MK Pilihan Politik Lokal dan Otda

No	Mata Kuliah	SKS
1	Legislasi Daerah dan Politik DPRD	3
2	Isu dan Kebijakan Pembangunan Daerah	3
3	Politik Keuangan Daerah	3
4	Budaya dan Pemikiran Politik Indonesia	3
5	Konstitusi dan Kelembagaan Negara	3
6	Penulisan Akademik dan Publikasi Ilmiah	3
7	Politik Identitas dan Nasionalisme	3
8	Politik, Hukum, dan Kebijakan	3
Total MKPK: 24 sks		

Tabel 16: MK Pilihan Politik Kebijakan Publik

No	Mata Kuliah	SKS
1	Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik	3
2	Kebijakan Fiskal dan Politik Anggaran	3
3	Policy Brief dan Riset Kebijakan Terapan	3
4	Manajemen Pelayanan Publik	3
5	Politik Birokrasi dan Reformasi Administrasi	3
6	Penulisan Akademik dan Publikasi Ilmiah	3
7	Ekonomi Politik Pembangunan	3
Total MKPK: 18 sks		

5. Sebaran Mata Kuliah Per Semester

SEMESTER 1 (15 SKS): Pondasi Keilmuan untuk Seluruh Mahasiswa

Tabel 17: Mata Kuliah Semester 1

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	MIP-101 (Lama/L)	Skop dan Metodologi Ilmu Politik	3
2	MIP-105 (L)	Teori Politik	3
3	MIP-106	Teori Negara, Demokrasi, dan Kekuasaan	3
4	MIP-107	Etika Politik, Etika Publik, dan Akuntabilitas	3
5	MIP-108	Teori Kebijakan Publik	3
		Total	15 SKS

SEMESTER 2 (15 SKS): Spesialisasi dan Proposal

Tabel 18: MK Wajib Umum untuk Seluruh Mahasiswa

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	MIP-206	Politik Global dan Isu Kontemporer	3

Tabel 19: Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
2	MIP-202 (L)	Metode Penelitian Ilmu Politik	3
3	MIP-207	Politik Lokal dan Desentralisasi	3
4	MIP-208	Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat–Daerah	3
5	MIP-209	Partai Politik dan Pemilu Daerah	3
		Total Semester 2	15 SKS

Tabel 20: Konsentrasi Politik Kebijakan Publik

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
2	MIP-210	Metode Penelitian Kebijakan Publik	3
3	MIP-211	Analisis Kebijakan Publik Lanjutan	3
4	MIP-212	Formulasi Kebijakan Publik	3
5	MIP-213	Politik Birokrasi & Reformasi Administrasi	3
		Total Semester 2	15 SKS

SEMESTER 3 (Minimum 9 SKS) – Pendalaman Pilihan

Tabel 21: Politik Lokal dan Otonomi Daerah

No.	Kode MK	Mata Kuliah Pilihan	SKS
1	MIP-301 (L)	Konstitusi dan Kelembagaan Negara	3
2	MIP-304 (L)	Isu dan Kebijakan Pembangunan Daerah	3
3	MIP-305 (L)	Politik Keuangan Daerah	3
4	MIP-308	Legislasi Daerah dan Politik DPRD	3
5	MIP-309	Budaya dan Pemikiran Politik Indonesia	3
6	MIP-310	Penulisan Akademik dan Publikasi Ilmiah	3

7	MIP-311	Politik Identitas dan Nasionalisme	3
8	MIP-312	Politik, Hukum, dan Kebijakan	3

Tabel 22: Politik Kebijakan Publik

No.	Kode MK	Mata Kuliah Pilihan	SKS
1	MIP-304 (L)	Isu dan Kebijakan Pembangunan Daerah	3
2	MIP-306 (L)	Manajemen Pelayanan Publik	3
3	MIP-313	Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik	3
4	MIP-314	Kebijakan Fiskal dan Politik Anggaran	3
5	MIP-315	Policy Brief dan Riset Kebijakan Terapan	3
6	MIP-310	Penulisan Akademik dan Publikasi Ilmiah	3
7	MIP-317	Ekonomi Politik Pembangunan	3

Mahasiswa mengambil 3 MK Pilihan Konsentrasi ($3 \times 3 = 9$ SKS)

SEMESTER 4 (6 SKS)

Tabel 23: Mata Kuliah untuk Semua Konsentrasi

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	MIP-401 (L)	Tesis/Publikasi Artikel Ilmiah	6

XI. MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

Manajemen Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya diselenggarakan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan berorientasi pada Outcome-Based Education (OBE) serta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 8, kebijakan dan standar akademik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta perkembangan keilmuan ilmu politik dan kebutuhan pemangku kepentingan. Pengelolaan kurikulum dilaksanakan melalui siklus perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan secara berkelanjutan (continuous quality improvement). Proses tersebut dilaksanakan secara sinergis oleh Program Studi, Fakultas, Gugus Penjaminan Mutu, dan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas untuk menjamin ketercapaian CPL, mutu proses pembelajaran, relevansi keilmuan, dan kualitas lulusan Magister Ilmu Politik.

Pengembangan kurikulum dilaksanakan secara partisipatif, berbasis kebutuhan, dan berorientasi pada perkembangan ilmu politik kontemporer. Program Studi melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, pakar/akademisi, organisasi profesi, pemerintah, lembaga legislatif, organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, dunia usaha dan sektor publik, serta mitra strategis lainnya. Pelibatan pemangku kepentingan dilakukan melalui forum akademik, lokakarya kurikulum, focus group discussion (FGD), survei pengguna lulusan, tracer study, serta kajian terhadap perkembangan keilmuan dan kebutuhan dunia kerja. Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa kurikulum mampu merespons perkembangan teori dan metodologi ilmu politik, dinamika demokrasi, perubahan politik lokal dan nasional, perkembangan kebijakan publik, transformasi digital dan kecerdasan buatan, serta tuntutan terhadap lulusan yang memiliki kapasitas akademik dan profesional yang tinggi.

Kurikulum Magister Ilmu Politik dikembangkan berdasarkan keterkaitan sistematis antara profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), bahan kajian, mata kuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Sub-CPMK, strategi pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Struktur kurikulum mengintegrasikan mata kuliah wajib program studi dengan mata kuliah konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah serta Politik Kebijakan Publik. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk membentuk lulusan yang mampu mengembangkan

pengetahuan melalui penelitian, melakukan analisis politik dan kebijakan secara kritis, memecahkan persoalan publik secara interdisipliner, serta menghasilkan rekomendasi yang berbasis bukti dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun profesional.

Pelaksanaan pembelajaran menerapkan pendekatan student-centered learning yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif sekaligus sebagai pembelajar dan peneliti. Proses pembelajaran pada jenjang Magister diarahkan tidak hanya pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada kemampuan berpikir kritis, reflektif, analitis, dan inovatif. Strategi pembelajaran dilaksanakan melalui kuliah interaktif, diskusi akademik, seminar, studi kasus, case method, problem-based learning, project-based learning, telaah literatur, analisis kebijakan, penelitian lapangan, analisis data, penulisan artikel ilmiah, policy brief, simulasi pengambilan keputusan, dan pembelajaran berbasis riset. Pembelajaran juga dapat memanfaatkan lingkungan pemerintahan, masyarakat, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, dan sektor publik sebagai ruang pembelajaran kontekstual.

Khusus pada konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah, proses pembelajaran diarahkan pada kemampuan menganalisis politik lokal, desentralisasi, otonomi daerah, pemerintahan daerah dan desa, demokrasi lokal, relasi pusat-daerah, serta dinamika kekuasaan dan masyarakat di tingkat lokal. Sementara itu, konsentrasi Politik Kebijakan Publik diarahkan pada pengembangan kemampuan menganalisis proses kebijakan mulai dari identifikasi masalah, formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan, termasuk pengembangan evidence-based policy, analisis data kebijakan, advokasi, komunikasi kebijakan, serta penyusunan rekomendasi strategis bagi lembaga pemerintah dan sektor publik.

Pada jenjang Magister, penelitian menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Mahasiswa diarahkan untuk mampu mengidentifikasi persoalan politik dan kebijakan yang relevan, mengembangkan kerangka teoritik, memilih dan menerapkan metodologi penelitian secara tepat, melakukan analisis data secara kritis, serta menghasilkan temuan yang memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu maupun penyelesaian persoalan publik. Integrasi penelitian dilakukan melalui tugas berbasis riset, seminar proposal, publikasi ilmiah, kegiatan penelitian dosen-mahasiswa, dan penyusunan tesis. Dengan demikian, tesis tidak hanya diposisikan sebagai persyaratan kelulusan, tetapi sebagai proses pembentukan kapasitas mahasiswa sebagai ilmuwan, peneliti, analis, dan profesional politik serta kebijakan publik.

Penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam pembelajaran dikembangkan secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Mahasiswa diarahkan untuk mampu memanfaatkan teknologi digital, sumber data elektronik, perangkat analisis data, serta berbagai teknologi kecerdasan buatan sebagai instrumen pendukung penelitian dan analisis politik. Pemanfaatan teknologi tetap didasarkan pada prinsip integritas akademik, validitas sumber, perlindungan data, etika penelitian, dan tanggung jawab ilmiah. Hal ini penting untuk membentuk lulusan yang mampu beradaptasi dengan transformasi digital tanpa kehilangan kemampuan berpikir kritis dan independensi akademik.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dilakukan secara berkala, terukur, dan berbasis bukti. Evaluasi mencakup keterlaksanaan pembelajaran, ketercapaian CPMK dan CPL, kualitas RPS dan asesmen, kinerja dosen, kualitas pengalaman belajar mahasiswa, capaian penelitian dan publikasi, serta relevansi mata kuliah dengan kebutuhan pengguna lulusan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan setiap semester melalui monitoring perkuliahan, evaluasi dosen oleh mahasiswa, evaluasi capaian pembelajaran, dan evaluasi kinerja akademik mahasiswa. Pada tingkat program studi, evaluasi diperkuat melalui audit mutu akademik internal, rapat tinjauan manajemen, tracer study alumni, survei kepuasan pengguna lulusan, serta masukan dari mitra dan pemangku kepentingan.

Evaluasi kurikulum juga dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu politik, perubahan lingkungan strategis, dinamika demokrasi, perkembangan politik lokal, perubahan kebijakan publik, transformasi digital, perkembangan kecerdasan buatan, serta perubahan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan terhadap bahan kajian, mata kuliah, RPS, metode pembelajaran, strategi asesmen, struktur kurikulum, maupun pengembangan konsentrasi. Evaluasi komprehensif kurikulum dilakukan secara periodik sesuai dengan ketentuan dan mekanisme penjaminan mutu perguruan tinggi.

Melalui mekanisme tersebut, Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menerapkan continuous quality improvement sebagai bagian integral dari pengelolaan kurikulum. Kurikulum tidak dipandang sebagai dokumen yang bersifat statis, tetapi sebagai sistem akademik yang terus dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan perubahan lingkungan strategis. Dengan demikian, pelaksanaan kurikulum diharapkan mampu menghasilkan lulusan Magister

Ilmu Politik yang berintegritas, kritis, analitis, adaptif, berbasis riset, mampu mengembangkan ilmu, menghasilkan rekomendasi politik dan kebijakan berbasis bukti, serta memberikan kontribusi nyata bagi penguatan demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan penyelesaian persoalan publik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

XII. SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI

Penerimaan mahasiswa baru merupakan salah satu tahapan strategis dalam menjamin keberlangsungan proses pendidikan, kualitas proses pembelajaran, dan pencapaian profil lulusan Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS). Oleh karena itu, sistem penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan secara terintegrasi melalui kebijakan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, objektivitas, akuntabilitas, keadilan, inklusivitas, dan kesetaraan kesempatan.

Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru mengacu pada kebijakan dan ketentuan penerimaan mahasiswa pascasarjana yang ditetapkan oleh Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Proses seleksi dilakukan untuk memastikan calon mahasiswa memiliki latar belakang akademik yang sesuai, kemampuan berpikir kritis dan analitis, kemampuan akademik yang memadai, motivasi untuk mengembangkan keilmuan, serta kesiapan mengikuti pendidikan pada jenjang magister. Seleksi juga mempertimbangkan potensi calon mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu politik maupun penyelesaian persoalan publik.

Sebagai program pendidikan magister dengan konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah dan Politik Kebijakan Publik, Program Studi Magister Ilmu Politik memberikan perhatian terhadap kesesuaian minat dan potensi akademik calon mahasiswa dengan bidang kajian yang tersedia. Calon mahasiswa diharapkan memiliki ketertarikan terhadap kajian politik, pemerintahan, demokrasi, kebijakan publik, politik lokal, tata kelola pemerintahan, maupun berbagai persoalan politik kontemporer. Hal tersebut menjadi dasar untuk mendukung proses pembelajaran berbasis riset dan pengembangan kompetensi sesuai dengan profil lulusan yang telah ditetapkan.

Sistem penerimaan mahasiswa baru juga memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, gender, maupun wilayah asal. Prinsip inklusivitas diterapkan untuk menciptakan lingkungan akademik yang beragam dan kondusif bagi pertukaran gagasan, dialog ilmiah, serta pengembangan perspektif yang kritis terhadap berbagai persoalan politik dan kebijakan publik.

Melalui sistem penerimaan yang selektif, transparan, dan berkeadilan tersebut, Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP UWKS berupaya memperoleh mahasiswa yang memiliki kapasitas akademik, integritas, motivasi belajar, kemampuan analitis, dan potensi penelitian yang memadai. Mahasiswa yang diterima diharapkan mampu mengikuti proses pendidikan pada jenjang magister secara optimal serta berkembang menjadi ilmuwan, peneliti, birokrat, analis, aktivis, dan konsultan politik maupun kebijakan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional serta mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pengembangan tata kelola publik.



Rektor,

Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, MSi.